

Jajak |

Memerangi Kejahatan Luar Biasa

TIGA peristiwa besar menggawati tahun 2016. Hingga kini perkembangan peristiwa itu terus bergulir dan menjadi perhatian publik. Dimulai dari kasus dugaan suap terhadap anggota DPR Damayanti Wisnu Putranto, kemudian aksi teror di Jalan Thamrin Jakarta, dan operasi penggerebekan sarang-sarang narkoba di Jakarta maupun sejumlah daerah. Ketiga kejadian itu tergolong luar biasa, sehingga penuntasannya perlu melalui cara-cara yang luar biasa pula.

Kasus korupsi, terorisme, dan narkoba menjadil luar biasa karena kejadian tersebut memungkinkan membina asakan satu-dua generasi mendatang. Kejadian korupsi memangkas harapan anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas karena anggaran negara yang difokuskan untuk sekolah justru dirampok oleh koruptor.

Aksi terorisme nyata menghilangkan saudara-saudara kita yang awam dengan gerakan radikal. Sedangkan penyalahgunaan narkoba bahkan bisa mematikan beberapa generasi. Narkoba bukan hanya mampu menghilangkan nyawa dan cendri mematikan, tetapi juga memungkinkan menghidupi gerakan radikalisme. Awalnya kita menyimak pengguna narkoba yang lemah kesadarannya sebagai manusia hingga bertindak di luar kendali. Aksi saling tembak antara petugas dan pengguna narkoba dalam operasi di Jakarta menjadi tengara jaringan itu bertindak nekat.

Kini, sindikat bandar narkoba dicurigai terkait dengan pendanaan aksi terorisme dan pencucian uang. Fredy Budiman, terpidana mati kasus narkoba, dikabarkan bergabung dengan kelompok teroris Islamic State. Fredy telah dibatasi oleh Aman Abdurrahman, terpidana kasus terorisme. Bahkan Badan Narkotika Nasional (BNN) sedang mendalam informasi tentang dugaan bandar narkoba menggunakan uangnya untuk mengembangkan usaha di bidang-bidang bisnis legal.

Perputaran uang hasil transaksi narkoba memang fantastis. Seorang gembong narkoba yang tengah mendekati di penjara mampu mengendalikan dana Rp 17 miliar. Aliran dana itu kini ditelusuri BNN bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan apakah termasuk pencucian uang. Lika sangka itu benar, perputaran uang hasil narkoba telah mengutamakan sebuah bisnis menguntungkan. Setali tiga uang dengan uang hasil jarahan para koruptor. Kita tidak bisa diam melihat fakta tiga kejadian luar biasa itu seperti kait-mengait sebagai jaringan kejadian besar di negara ini.

Perang terhadap narkoba menjadi harga mati, mematikan perilaku korup menjadi keharusan, dan meredam gerakan radikal adalah keniscayaan. Negara harus hadir dalam setiap gerak warga negara untuk menjamin rasa aman. Dengan perangkat strukturalnya, negara harus bergerak sistematis membatasi agresivitas penjahat. ●

Cabik Lunik |

Pendangkalan Politik

PETANI tengah sibuk menghadapi berbagai kesulitan yang datang menyerbu tak henti. Kemeraruan, banjir, hama tikus, dan belalang mengancam tanaman padi. Rakyat kecil kemandirian masih puli menerima cobaan berupa berbagai penyakit semacam demam berdarah, malaria, AIDS, dan sebagainya.

Di sisi yang sangat bertolak belakang, kaum elite politik, pejabat negeri/daerah, dan politikus menyibukkan diri dengan urusan mereka sendiri. Kekuasaan, kekayaan, dan pengaruh terlalu mengjuruk dilewatan begini saja. Kebetulan peluang itu tengah ada: PAW, kursi pimpinan kosong, pilkada, dan berbagai kursi kini tengah menanti. Itu barangkali lebih riil ketimbang harus turun ke bawah melihat sendiri penderitaan masyarakat kecil.

Saat rakyat menderita menemui berbagai musibah yang datang beruntun dan tak henti, legislator malah sibuk memperjuangkan uang purnabakti, uang pensiun, uang pengabdian, uang jasa, uang terima kasih, uang kehormatan atau uang apa pun yang diatur atau tidak diatur perundungan. Pokoknya, bagaimana dengan sisu jabatan yang hanya beberapa bulan lagi. Dewan dapat membuat saving dari uang rakyat.

Mamat Kenut membatin, bagaimana mungkin pejabat dan politisi itu lupa dengan kemiskinan, keterbelakangan, dan kehodohan yang masih menghinggapi kehanyaran masyarakat negeri ini? Bagaimana mungkin mereka tega melakukan itu semua tanpa merasa harus bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan dan tanpa melihat apa akibat kelakuan mereka?

Kritik tetaplah banyak, tetapi hampir sama sekali tak berarti. Koruptor manipulator, dan berbagai pelaku kejadian besar atau kecil tetap saja berkelakuan. "Keadilan begitu mudah dibeli; dengan kuasa atau harta. Hukum tak berarti banyak. Ini rii. Bukan semata tuding-tudingan, semacam gerundungan orang yang sering dituding "karena belum kebagian, bicaranya keras." Ada apa sih?" tanya Mat Puhit.

Kebiasaan menghadapi masalah dengan monokausal ini merupakan bentuk pendangkalan dan pemikiran politik. Model pendekatan ini adalah adik kandung pragmatisme yang mewarnai mentalitas dan cara berpikir produk sistem pendidikan yang menghindari hasil segera. Sebenarnya, pragmatisme positif. Paham ini memangnya sesuatu dikatakan baik jika memecahkan masalah tanpa terjerumus dalam perdebatan yang kontraproduktif. Tapi, pragmatisme menjadi ototiter ketika menafikan perdebatan teoretis, diskusi tentang nilai, perdebatan ideologis atau diskusi tentang prioritas hanya demi mengejar hasil segera.

"Kita ini suka meremehkan segala sesuatunya. Ala gampang. Kalau sudah hegit, terbiasa aja semua. Etika, moral, nilai, norma, kepantasan, bahkan peraturan perundungan-dan tak berarti apa-apa. Begitukah?" tanya Ukiien. *Induh!* ●

Fajar Sumatera

Rедакtor in负责編輯: Kurniawan
Penulis Umum: Deni Kurniawan
Penulis Redaksi/Penanggung Jawab: Abdulah Al Mas'ud
Penulis Penutupan:

Penerbit: PT Fajar Intermedia Utama
Pemimpin Umum: Deni Kurniawan
Penulis Redaksi/Penanggung Jawab: Abdulah Al Mas'ud
Penulis Penutupan:

Direktorat Pelaksana: Udo Z. Karz
Editor: Pak Iman Syah, Rendi
Ditributor: Surya
Aviation Redaktor: Supardi

Liputan Bandarlampung: Abdul Rosid, Deke Agustina, Prisia Octa Vidyantara, M. Burhan, Rikman Raydy, Ibu Faizah, Yoni Lestaria.
Fotoografer: Tommy Saputra, Prasatika
Tuliskan: Kusumahan (Kabag.), Rendi
Bulan & Promosi: Maylani, Iwan Apandi
Distribusi & Stokalist: Rad Histone (Kabag), Wekido
Sekretaris Redaksi: Firia Irawayana

di pasar valuta asing (valas) kita diwarnai oleh lebih tingginya permintaan valas, terutama dollar AS, daripada pasokannya. Tingginya permintaan pada dollar AS itu didasari oleh beberapa alasan, antara lain untuk kebutuhan impor, pembayaran utang luar negeri, dan penjualan barang jasa dalam satuan valuta asing.

Repotnya, guna memenuhi kebutuhan valas di dalam negeri, sekitar 80 persen pelaku pasar masih bertransaksi di pasar spot atau melakukan penjualan dan pembelian secara tunai atau langsung. Baru sekitar 20 persen pelaku pasar yang melakukan transaksi bukan spot, seperti melalui forward atau swap (transaksi dengan janji membayar di kemudian hari).

Selain itu, baru sekitar 26 persen pelaku transaksi valas yang melakukan transaksi di wilayah NKRI tak bisa dipandang sebagai konsekuensi dari liberalisasi, tetapi dapat diilahui sebagai bentuk "ancaman" atau soft invasion terhadap kedaulatan politik dan ekonomi suatu negara.

Pengalaman beberapa negara di Amerika Latin, Karibia, dan Pasifik membuktikan bahwa sikap permissif pada penggunaan mata uang asing di dalam negeri pada akhirnya justru menggusur atau menggantikan mata uang lokal.

Simbol kedaulatan
Selain kehadiran faktor di atas, secara geopolitik kita juga melihat kecenderungan meningkatnya pemakaian mata uang asing, khususnya dollar AS, dalam berbagai transaksi di wilayah NKRI. Dalam praktik sehari-hari, masih banyak masyarakat Indonesia yang enggan menggunakan rupiah dan cenderung memilih menggunakan mata uang asing.

Transaksi mata uang asing di wilayah NKRI yang dilakukan antar-penduduk Indonesia secara nonbank jumlahnya cukup tinggi. Bayangkan, angkanya mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 78 triliun setiap bulan. Hal ini berarti sekitar Rp 936 triliun per tahun. Sementara itu, perputaran uang kertas asing di Indonesia mencapai sekitar Rp 10 triliun per bulan.

Tingginya transaksi dalam dollar atau "dolarisasi" tersebut telah merambah ke segala sektor ekonomi, mulai dari sektor migas, pelabuhan, tekstil, manufaktur hingga perdagangan. Fenomena penggunaan mata uang asing di wilayah NKRI tak bisa dipandang sebagai konsekuensi dari liberalisasi, tetapi dapat diilahui sebagai bentuk "ancaman" atau soft invasion terhadap kedaulatan politik dan ekonomi suatu negara.

Pengalaman beberapa negara di Amerika Latin, Karibia, dan Pasifik membuktikan bahwa sikap permissif pada penggunaan mata uang asing di dalam negeri pada akhirnya justru menggusur atau menggantikan mata uang lokal. Ada premis yang mengatakan bahwa mata uang yang kuat akan menggeser yang lemah.

Beberapa kebijakan perlu ditempuh untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas. Pertama, upaya melakukannya pendalaman pasar keuangan. Langkah ini perlu dilakukan agar pelaku pasar memiliki lebih banyak pilihan instrumen dan kemudahan dalam bertransaksi sehingga mengurangi risiko. Kedua, monitoring yang ketat terhadap utang luar negeri. •

Quo Vadis Daerah Perbatasan

Riza Multazam Luthfy
Penulis, alumnus Pascasarjana UII
Yogyakarta

KONDISI infrastruktur di wilayah perbatasan cenderung tertinggal dibandingkan di pusat kota. Tak heran jika akhir-akhir ini pemerintah menggalakkan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan.

Selama ini, keunggulan daerah perbatasan kurang tereksploitasi dengan baik. Akibatnya, potensinya yang luar biasa tidak menjadi daya tarik bagi sejumlah pihak untuk mengembangkannya. Atas dasar inilah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar membuat para investor untuk menanamkan modal. Ada tiga kategori usaha di daerah perbatasan yang dapat diolah, baik kegiatan usaha primer (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan), sekunder (industri rumah tangga dan agroindustri), maupun tersier (jasa pelayanan, jasa konstruksi, dan jasa perdagangan).

Program PKBI
Dalam rangka mendorong investasi di daerah perbatasan, pemerintah meluncurkan konsep program pembangunan kawasan berbatasan Indonesia (PKBI). Program ini diharapkan mampu mengangkat "daerah" daerah perbatasan sebagai beranda negara yang layak mendapat perhatian lebih. Dengan demikian, percepatan pembangunan di sana merupakan sebuah kenisycayaan.

Program PKBI memiliki target menumbuhkan daerah perbatasan menjadi pusat perkotaan, sehingga ia akan lagi sebatas pos lintas batas negara, tapi pintu gerbang perdagangan internasional, simpul utama kegiatan eksport dan impor, juga pusat pertumbuhan ekonomi yang turut mendongkrak perkembangan kawasan di sekitarnya.

Dengan dibangunnya sejumlah aset, kebutuhan dasar, sarana dan prasarana transportasi, serta konektivitas antar pulau di daerah perbatasan, maka fokus utama pemerintah mengindikasikan bahwa Indonesia dari pinggiran bisa terwujud. Selain itu, lemahnya manajemen birokrasi dan organisasi kerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik di sana bisa diminimalisir.

Pembangunan Partisipatif
Beragam konflik kerap menghinggapi sejumlah daerah perbatasan di Indonesia. Lahirnya konflik-konflik tersebut tidak terlepas dari fakta

aman. Pemerintah genap mengubah pandangan terhadap daerah perbatasan.

Menurut Said (2012), sejak 2008 terjadi perubahan perspektif bahwa pulau-pulau terluar dan daerah perbatasan bukan lagi beranda belakang negara yang kurang memiliki peran dan kontribusi. Paradigma baru mengukuhkan daerah perbatasan sebagai beranda terdepan negara yang layak mendapat perhatian lebih. Dengan demikian, percepatan pembangunan di sana merupakan sebuah kenisycayaan.

Program PKBI memiliki target menumbuhkan daerah perbatasan menjadi pusat perkotaan, sehingga ia akan lagi sebatas pos lintas batas negara, tapi pintu gerbang perdagangan internasional, simpul utama kegiatan eksport dan impor, juga pusat pertumbuhan ekonomi yang turut mendongkrak perkembangan kawasan di sekitarnya.

Dengan dibangunnya sejumlah aset, kebutuhan dasar, sarana dan prasarana transportasi, serta konektivitas antar pulau di daerah perbatasan, maka fokus utama pemerintah mengindikasikan bahwa Indonesia dari pinggiran bisa terwujud. Selain itu, lemahnya manajemen birokrasi dan organisasi kerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik di sana bisa diminimalisir.

Soal kereta cepat, Fadli Zon menyebut Jokowi menabrak aturan.

Atas dasar inilah, jangan sampai program PKBI hanya menjadi pepesan kosong dan retorika politis yang mengesampingkan nilai-nilai humanis. Perlu disadari, tingginya

bahwa mereka yang menghuni daerah perbatasan sudah akrab dengan persoalan kemiskinan, segregasi sosial, keamanan, dan budaya.

Yang tidak kalah penting yaitu masalah geopolitik berupa sengketa perbatasan (border dispute) dengan negara lain. "Pertama, soal administratif wilayah perbatasan dan segala konsekuensi teknis lainnya. Ini barangkali tidak begitu rumit. Yang cukup kompleks adalah problem nasionalisme. Masalah kedua ini sudah lama menjadi perhatian pemerintah, tetapi belum ada solusi tetap." (Kumolo, 2015)

Faktor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan rendahnya kualitas pelayanan publik di negeri ini menyebabkan mereka yang berdomisili di daerah-daerah perbatasan juga berkontribusi terhadap permasalahan. Mereka harus terlibat dalam mengatasi permasalahan yang melingkupi diri dan lingkungannya. Mereka tidak semestinya dianggap sebagai beban sosial dan negara, melainkan aktor dan subjek pengunggungan.

Implementasi program PKBI selanjutnya disinergikan dengan program lain sebagai kesatuan sistem pengembangan potensi daerah perbatasan. Pendekatan pengembangan daerah perbatasan juga harus diarahkan pada perspektif investasi dengan skenario hasil investasi jangka pendek dan menengah. Digenjotnya peningkatan sarana, prasarana, dan infrastruktur semestinya dapat semaksimal mungkin memperpendek rentang kendali (span of control) antara pengambil kebijakan dan masyarakat serta menciptakan pemerataan pembangunan.

Untuk mewujudkan hal di atas, diperlukan political will pemangku kebijakan dan kerja sineas stakeholder. Dengan demikian, selain meyakini bahwa daerah perbatasan merupakan garda terdepan yang menjaga keutuhan NKRI, publik juga menganggap bahwa pengelolaan sumber daya alam dan pembiayaan sumber daya manusia Indonesia tidak hanya terkonsentrasi di Jawa. •

Suara Pembaca

Rendahnya Minat Baca di Negeri Ini

KITA dihadapkan pada kenyataan serius (sobering fact). Kondisi minat baca masyarakat Indonesia sangat memperhatinkan. Berdasarkan hasil survei UNESCO (2011), minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Indeks baca masyarakat Indonesia baru mencapai 0,001 atau 1:1000. Itu artinya dalam seribu orang masyarakat Indonesia, hanya satu orang memiliki minat baca buku.

Ada beberapa penyebab kenapa minat baca masyarakat Indonesia rendah. Pertama, pendidikan kita tidak melahirkan pelajar untuk terbiasa membaca. Jarang kita temui guru yang memotivasi muridnya untuk membaca buku, paling hanya untuk keperluan mengerjakan tugas sesuai mata pelajaran.

Kedua, adanya animo di masyarakat Indonesia bahwa membaca hanya untuk kalangan yang bergelut dengan dunia pendidikan seperti dosen, peneliti, mahasiswa, guru dan siswa.

Ketiga, malas dan minimnya motivasi dari lingkungan sekitar.

Keempat, rendahnya kemampuan

masyarakat untuk memiliki buku,

karena masyarakat kita masih terpaut dengan kebutuhan-kebutuhan dasar.

Kelima, ketersediaan bahan bacaan yang sedikit atau sulit untuk mengakses buku.

Rendahnya minat baca masyarakat

Indonesia berdampak sistemik dan masif pada berbagai lini dunia perburuan yang meliputi: penulis, produksi dan kualitas buku, penerbit, dan perpustakaan (universitas, daerah, nasional dan umum). Jumlah penulis dan buku yang diproduksikan juga sangat rendah. Dari sisi publikasi, jumlah buku di Indonesia hanya 24.000 judul/tahun. Jika kaitkan dengan total populasi Indonesia sekitar 240 juta orang, maka setiap 1 buku untuk 10.000 orang. Angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Dian Permata
Kemiling, Bandarlampung

• DPR perketat penyadapan KPK, nanti harus seizin Dewan Pengawas.

• Dan, kian amanlah para tikus menggegot negeri.

• Soal kereta cepat, Fadli Zon menyebut Jokowi menabrak aturan.

• Kasian aturan, pingsan berkali-kali.

Lampung Barat:
Yosua (Kepala)
Pesisir Barat:
Sony, Rizan
Jakarta:
John Pardede Sayid
Yogyakarta:
Hizwan Iskandar Jaya
Media Partner:
www.cavogeh.com
Legal:
Wahru Firdaus Sihabah, SH

Percepatan
PT Lampung Intermedia
(hal di luar tanggung jawab perusahaan)

Redaksi menerima kiriman tulisan cerita dan tidak diizinkan ke media lain panjang maksimal 5.000 karakter, dengan nomor kontak/kirim ke email: opini@fajarsumatera.com. Kami mengutamakan tulisan yang mengajak rasional dan

Wartawan Fajar Sumatera wajib dibekali kartu pers yang masih berlaku. Wartawan Fajar Sumatera tidak menerima atau menulis sesuatu apapun dari narasumber dengan alasan apapun, jika mengajak pola pikir lemah. Lebih-lebih ketentuan ini membantu

untuk dapat menghubungi redaksi ke no. 0812 7314 3333.